

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH POANGKA-ANGKATAKA

Mahrudin

Dosen Jurusan Syariah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari

Abstrak :

Penelitian ini mengkaji pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif falsafah poangka angkataka. Poangka-angkataka yang dimaksud adalah sikap saling menghargai, saling mengutamakan, dan saling memberi penghargaan terhadap orang lain. Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan *civic education* ditemukan bahwa falsafah ini mengandung pengertian tersendiri, yaitu bahwa setiap anggota masyarakat yang sudah memberikan darma baktinya kepada masyarakat dan bangsa, wajib diberikan penghargaan yang setimpal, yang dapat mengangkat derajat dan martabatnya dimata masyarakat. Dharma bakti itu berupa memenangkan suatu perang, menyerahkan dengan ikhlas harta bendanya bagi kepentingan umum, memiliki suatu ilmu atau keterampilan yang berguna bagi kepentingan umum dan lain-lain. Kepada mereka itu diberikan balas jasa, penghargaan atau kehormatan tertentu seperti diberikan sebidang tanah untuk dimiliki turun-temurun, atau diberikan suatu pangkat tertentu. Hal itu dimaksudkan agar setiap anggota masyarakat mempunyai kesediaan berkorban dan berjihad untuk kepentingan umum dan hal ini sesuai dengan Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan melahirkan warga negara yang memiliki jiwa dan semangat patriotisme dan nasionalisme yang tinggi.

Kata Kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Falsafah, Poangka-angkataka

*Civic Education in the Perspective of Philosophy of Poangka-Angkata
By Maharudin*

This study aims to discuss the civic education in the perspective of philosophy of poangka-angkataka. Poangka-angkataka means the attitude of respecting other people. This study used descriptive qualitative and civic education as an approach. This study found out that every member of the society who has done something good for the society and the country, such as winning the battle, give charity, useful knowledge and skill, will be rewarded with piece of land or main occupation within the community. This reward will bring this person to the higher level of respect within the society. In addition, this aims to encourage other members of the community to have willingness to sacrifice their self for their society. This philosophy is, indeed, in line with the philosophy of civic education which aims to create good citizens who have patriotic and nationalistic feeling to fight for the country.

Key words: Civic Education, Philosophy, Poangka-angkataka

ملخص

poangka هذا التعليم المواطنة دراسة من منظور الفلسفة
angkataka. Poangka-angkataka هو الاحترام المتبادل
والأولوية المتبادلة، وإعطاء كل الاحترام للآخرين الأخرى.
باستخدام نوعية نهج التحليل الوصفي للتربية المدنية وجدت
ي أن كل فرد من أفراد المجتمع أن هذه الفلسفة يعني الخاصة به، أ
قد أعطى التفاني دارما للمجتمع والأمة، يجب أن يكافأ العينية
والتي يمكن أن ترفع والكرامة في أعين الجمهور. دارما التفاني
في شكل فوزها في الحرب، سلم عن طيب خاطر على ممتلكاتهم من
مفيدا أجل الصالح العام، لديهم معرفة أو مهارة يمكن أن يكون
للجمهور وغيرها. لهم أنه تم إعطاء المزايا الإضافية، مثل جائزة
الشرف أو تعطى لقطعة أرض مملوكة للأجيال، أو إعطاء رتبة
معينة. كان المقصود به أن كل فرد من أفراد المجتمع لديه
الاستعداد للضحية والجهاد في سبيل المصلحة العامة وتتفق
لاد يهدف التعليم لديهم روح وروح مع المواطنة المواطنين المي
الوطنية والقومية مرتفعة
Poangka-angkataka، كلمات البحث: التربية المدنية، الفلسفة

A. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi yang ditandai dengan kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur pecaturan perpolitikan, perekonomian, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan global. Kondisi ini akan menumbuhkan berbagai konflik kepentingan, baik antar negara maju dengan negara-negara berkembang, maupun antar sesama negara-negara berkembang sendiri serta lembaga-lembaga Internasional. Kecuali itu adanya isu-isu global yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, turut pula mempengaruhi keadaan nasional.

Globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi komunikasi dan transportasi sehingga dunia menjadi semakin transparan, seolah-olah menjadi seperti kampung dunia tanpa mengenal batas negara (Edy Pramono, 2004: 1-2), suatu peristiwa yang terjadi di salah satu kawasan, seketika itu juga dapat diketahui dan diikuti oleh mereka yang berada di kawasan lain. Contoh: peristiwa pembunuhan terhadap 3 orang personil UNHCR dikamp pengungsi Timor Timur di Atambua tanggal 6 September 2000 langsung tersiar di seluruh dunia, dan mendorong Dewan Keamanan PBB

mengeluarkan Resolusi Nomor 1319, tanggal 9 September 2000, dan Amerika Serikat mengenakan embargo militer terhadap Indonesia. Ini berarti era globalisasi itu dapat berdampak besar, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Dampak positif adalah seperti dapat meningkatkan kesejahteraan, memberi peluang-peluang baru, sedang yang negatif adalah seperti dapat mengganggu keamanan, memperburuk ekonomi, marginalisasi sosial dan meningkatnya kemiskinan.

Di era globalisasi juga akan berkembangnya suatu standarisasi yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. Negara atau pemerintah dimanapun, terlepas dari sistem ideologi atau sistem sosial yang dimiliki, dipertanyakan apakah hak-hak asasi dihormati, apakah demokrasi dikembangkan, apakah kebebasan dan keadilan dimiliki oleh setiap warganya, bagaimana lingkungan hidup dikelola. Implikasi globalisasi menjadi semakin kompleks karena masyarakat hidup dalam standar ganda. Di satu pihak orang ingin mempertahankan budaya lama yang diimprovisasikan untuk melayani perkembangan baru, yang disebut dengan budaya sandingan (*sub-culture*). Di pihak lain muncul tindakan-tindakan melawan terhadap perubahan-perubahan yang dirasakan sebagai "nestapa" dari mereka yang dipinggirkan, tergeser dan tergusur, tidak terlayani oleh masyarakatnya, yang disebut sebagai budaya tandingan (*counter-culture*). Ini berarti globalisasi juga akan menciptakan struktur baru, yaitu struktur global. Kondisi ini akan mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta akan mempengaruhi juga dalam pola pikir, sikap dan tindakan masyarakat di Indonesia sehingga akan mempengaruhi kondisi mental spiritual bangsa Indonesia.

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai dengan era pengisian kemerdekaan, menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai-nilai ini dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan. Kesemuanya tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wadah Nusantara.

Perjuangan secara fisik yang sesuai bidang masing-masing

tersebut memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon cendekiawan pada khususnya, yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Sebab Pendidikan Kewarganegaraan adalah merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan kemampuan dan pengetahuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar dapat menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negaranya. Jadi tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membekali peserta didik dengan kemampuan dan pengetahuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara. Oleh karena itu dalam pengajarannya perlu dijelaskan bagaimana bentuk hubungan antara warga negara yang sehat, positif, dan dapat diandalkan.

Prinsip pengetahuan seperti yang dikemukakan di atas telah tertuang dalam Falsafah *Binci-Binciki Kuli* sebagai sistem nilai dan norma yang dipedomani segenap masyarakat di Kabupaten Buton merupakan buah pikir leluhur yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dalam membangun hubungan interaksi antar warga masyarakat, inti kandungan nilai yang ada dalam falsafah tersebut salah satunya adalah *poangka-angkataka*, yang berarti saling menghargai dan saling mengangkat derajat kemuliaan antar warga masyarakat terwujud dalam sikap dan perilaku saling memahami fungsi dan kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing.

B. Pendidikan Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dalam bahasa latin disebutkan "*Civis*", selanjutnya dari kata "*Civis*" ini dalam bahasa Inggris timbul kata "*Civic*" artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata "*Civic*" lahir kata "*Civics*", ilmu kewarganegaraan dan *Civic Education*, Pendidikan Kewarganegaraan.

Pelajaran *Civics* mulai diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1790 dalam rangka "mengamerikakan bangsa Amerika" atau yang terkenal dengan nama "*Theory of Americanization*". Sebab seperti diketahui, bangsa Amerika berasal dari berbagai bangsa yang datang di Amerika Serikat dan untuk menyatukan menjadi bangsa Amerika maka perlu diajarkan *Civics* bagi warga negara Amerika Serikat. Dalam taraf tersebut, pelajaran *Civics* membicarakan masalah "government", hak dan kewajiban warga negara dan *Civics*

merupakan bagian dari ilmu politik.¹

Di Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan yang searti dengan “*Civic Education*” itu dijadikan sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa di Perguruan Tinggi untuk program diploma/politeknik dan program Sarjana (SI), baik negeri maupun swasta.

Di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dipakai sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat a) Pendidikan Pancasila, b) Pendidikan Agama, dan c) Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).

Pendidikan Kewarganegaraan yang dijadikan salah satu mata kuliah inti sebagaimana tersebut di atas, dimaksudkan untuk memberi pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga Negara dengan negara, serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (SK Dirjen DIKTI no.267/DIKTI/Kep/2000 Pasal 3).

Melihat begitu pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan atau *Civics Education* ini bagi suatu Negara maka hampir di semua Negara di dunia memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan yang mereka selenggarakan. Bahkan Kongres *Internasional Commission of Jurist* yang berlangsung di Bangkok pada tahun 1965, mensyaratkan bahwa pemerintahan suatu negara baru dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang demokratis manakala ada jaminan secara tegas terhadap hak-hak asasi manusia, yang salah satu di antaranya adalah Pendidikan Kewarganegaraan atau “*Civic Education*”. Hal ini dapat dimaklumi, karena dengan dimasukkannya ke dalam sistem pendidikan yang mereka selenggarakan, diharapkan warga negaranya akan menjadi warga negara yang cerdas dan warga negara yang baik (*smart and good citizen*), yang mengetahui dan menyadari sepenuhnya akan hak-haknya sebagai warga negara, sekaligus tahu dan penuh tanggung jawab akan kewajiban dirinya terhadap keselamatan bangsa dan negaranya. Dengan demikian diberikannya Pendidikan Kewarganegaraan akan melahirkan warga negara yang memiliki jiwa dan semangat patriotisme dan nasionalisme yang tinggi.

¹ <http://www.scribd.com/doc/56233082/Pendidikan-Kewarganegaraan> di akses tgl, 09-04-2012

Salah satu tujuan nasional ialah mencerdaskan *kehidupan bangsa*. Cerdas dalam arti luas, bukan hanya intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang didasari oleh Pancasila. Sebagai ideologi nasional, Pancasila merupakan kekuatan pemersatu dalam pembangunan karakter bangsa yang salah satunya adalah semangat kebangsaan atau semangat persatuan yang multikultur dalam Bhineka Tunggal Ika.

Membangun semangat kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan dalam segala aspek tidak mudah, ia memerlukan penyadaran sikap hidup warga negara yang menghargai nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan sosial, cinta tanah air, memiliki kesadaran hukum, dan kemampuan bela negara. Nilai-nilai tersebut harus disemai, ditanam, dipupuk, dan disebarluaskan secara terencana, teratur, dan terarah pada seluruh lapisan masyarakat agar tumbuh warga negara yang cerdas menghadapi zamannya.

C. Falsafah Poangka-Angkataka

Falsafah ialah satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Perkataan falsafah dalam bahasa Melayu berasal dari bahasa Arab *فلسفة*, atau dalam bahasa Yunani “*philosophia*”, yang bermakna cinta kepada hikmah. Oleh karena itu, falsafah mempunyai ciri-ciri: (1) satu usaha pemikiran manusia secara tuntas, dan (2) bertujuan untuk mendapatkan kebenaran².

Falsafah secara harafiah dapat diartikan sebagai suatu kerangka konseptual pemikiran manusia sebagai simbol kemajuan peradaban hidup setiap masyarakat dan bernegara. Falsafah adalah sesuatu entitas (*being*; sesuatu yang ada) di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Setiap bangsa memiliki falsafah yang digunakan sebagai suatu sistem nilai dan norma (*pranata*), berfungsi untuk mengendalikan sikap dan perilaku setiap warga masyarakatnya sehingga tercipta *setting* kehidupan sosial yang baik. Dengan kata lain, falsafah menyentuh setiap persoalan kehidupan manusia tentang baik dan buruk (*moralitas*), sifatnya mengikat dan memaksa.

Falsafah merupakan buah karya pemikiran ilmiah dan kritis manusia terhadap setiap aspek kehidupan, dijewantahkan dalam kebudayaan, yang pada akhirnya falsafah menjadi simbol-simbol kebudayaan satu masyarakat tertentu yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini senada dengan penegasan Saidi

² Wikipedia, 2012

yang mengemukakan bahwa, falsafah Poangka-ngkataka adalah suatu nilai yang sifatnya abstrak, dimana pengertiannya menganut dasar hukum kekerabatan dalam arti berasaskan kehidupan kekeluargaan, kebersamaa, seperasaan dan sepenanggungan, berwujud “*Adatul Azali/Sumber Adat*” bagi masyarakat eks. Kesultanan Buton³.

Secara teoritis, (Wikipedia, 2012) dikemukakan bahwa, falsafah dapat dikelompokkan ke dalam bidang kajian, yaitu: (1) metafisik, yaitu tentang keberadaan atau wujud sesuatu (2) epistemologi, yaitu tentang kedudukan suatu ilmu pengetahuan (3) etika, adalah moral kemanusiaan yang terwujud dalam sikap dan perilaku (4) logis, falsafah dapat diterima secara ilmiah kebenarannya, dan (5) estetika, yaitu suatu kajian tentang seni atau keindahan. Falsafah hidup suku Makassar misalnya, *Siri'* dianggap sesuatu yang perlu ditegakkan bilamana pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan telah dilakukan perseorangan kepada orang lain, satu kelompok kepada kelompok yang lain. Oleh karena itu, falsafah *Siri'* diterima secara mutlak oleh masyarakatnya. Dengan kata lain, *siri'* sebagai rasa malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat dan martabat manusia yang berkaitan erat dengan kemuliaan dan pemulihan harga diri, sebagaimana dikemukakan Zainal Arifin bahwa, *Siri'* mengandung tiga nilai sekaligus, yaitu nilai filosofis, nilai etis, dan nilai estetis⁴.

Poangka-angkataka pada dasarnya merupakan salah satu sila dari falsafah Pobinci-Binciki Kuli eks Kesultanan Buton yang merupakan hasil karya pemikiran para leluhur yang mencakup hal, yaitu tentang sikap saling menghargai, saling menghormati, mengangkat derajat dan segan antara hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat.

Falsafah ini mengandung pengertian tersendiri, yaitu bahwa setiap anggota masyarakat yang sudah memberikan darma baktinya kepada masyarakat dan bangsa, wajib diberikan penghargaan yang setimpal, yang dapat mengangkat derajat dan martabatnya dimata masyarakat. darma bakti itu berupa memenangkan suatu perang, menyerahkan dengan ikhlas harta bendanya bagi kepentingan umum, memiliki suatu ilmu atau keterampilan yang berguna bagi kepentingan umum dan lain-lain.

Kepada mereka itu diberikan balas jasa, penghargaan atau

³ Deden M. La Ode, Memaknai Falsafah Binci-Binciki Kuli Masyarakat Buton dalam Pendidikan dan Pembentukan Karakter Anak, www.dedenbinlaode.web.id, di akses tanggal 8 september 2012.

⁴ Ibid. hal 5

kehormatan tertentu seperti diberikan sebidang tanah untuk dimiliki turun-temurun, atau diberikan suatu pangkat tertentu. Hal itu dimaksudkan agar setiap anggota masyarakat mempunyai kesediaan berkorban dan berjihad untuk kepentingan umum.

Tetapi apabila sila ini tidak diamalkan lagi maka akibatnya orangpun akan apatis bersikap masa bodoh terhadap kepentingan atau keselamatan Negara dan bangsa karena pengorbanannya tidak dihargai. Ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang, semangat patriotisme dan heroisme akan hilang, yang berakibat Negara menjadi lemah.

D. Relasi Antara Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Falsafah Poangka-Angkataka

Setiap warganegara hakekatnya dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya. Untuk itu diperlukan bekal ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, moral dan budaya bangsa. Fungsinya adalah sebagai panduan dan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan nilai budaya bangsa menjadi pijakan utama, karena tujuan pembelajaran ialah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, juga sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan budaya bangsa.

Pendidikan Kewargaan (*civic education*) sesungguhnya bukanlah agenda baru di muka bumi. Hanya saja, proses globalisasi yang melanda dunia pada dekade akhir abad 20 telah mendorong munculnya pemikiran baru tentang pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara. Di Eropa, Dewan Eropa telah memprakarsai proyek demokratisasi untuk menopang pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Hal yang sama juga terjadi di Australia, Canada, Jepang dan negara Asia lainnya.

Di Amerika Serikat pendidikan kewarganegaraan diatur dalam kurikulum sosial selama satu tahun, yang pelaksanaannya diserahkan kepada negara-negara bagian. Materi yang diajarkan diarahkan pada : 1). Bagaimana menjadi warga yang produktif dan sadar akan haknya sebagai warga Amerika dan warga dunia; 2). Nilai-nilai dan prinsip demokrasi konstitusional; dan 3). Kemampuan mengambil keputusan selaku warga masyarakat demokratis dan multikultural di tengah dunia yang saling tergantung. Di Australia, pendidikan kewarganegaraan ditekankan pada *discovering democracy*, yaitu: 1). Prinsip, proses dan

nilai demokrasi; 2). Proses pemerintahan; dan 3). Keahlian dan nilai partisipasi aktif di masyarakat⁵.

Di Negara-negara Asia, Jepang misalnya, materi pendidikan kewarganegaraan ditekankan pada *Japanese history, ethics* dan *philosophy*. Di Filipina materi difokuskan pada : *Philipino, family planning, taxation and landreform, Philiphine New Constitution* dan *study of humanity* (Kaelan, 2003:2)⁶. Hongkong menekankan pada nilai-nilai Cina, keluarga, harmoni sosial, tanggung jawab moral, mesin politik Cina dan lain-lain. Taiwan menitik beratkan pada pengetahuan kewarganegaraan (disusun berdasarkan psikologi, ilmu sosial, ekonomi, sosiologi, hukum dan budaya); perilaku moral (kohesi sosial, identitas nasional dan demokrasi); dan menghargai budaya lain. Thailand, berusaha : 1). Menyiapkan pemuda menjadi warga bangsa dan warga dunia yang baik; 2). Menghormati orang lain dan ajaran Budha; dan 3). Menanamkan nilai-nilai demokrasi dengan raja sebagai kepala negara. Beberapa negara yang lain juga mengembangkan studi sejenis, yang dikenal dengan nama *Civic Education*.

Dari sini terlihat bahwa secara umum falsafah poangka-katakata mempunyai relasi dengan pendidikan kewarganegaraan di Amerika dan Australia lebih difokuskan pada pentingnya hak dan tanggungjawab individu, sistim dan proses demokrasi, HAM dan ekonomi pasar sedangkan negara-negara Asia lebih menekankan pada aspek moral (karakter individu), kepentingan komunal, identitas nasional dan perspektif internasional (Sobirin, 2003:11-12)⁷.

Sementara itu Di Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan yang searti dengan "*Civic Education*" itu dijadikan sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa di Perguruan Tinggi untuk program diploma/politeknik dan program Sarjana (SI), baik negeri maupun swasta.

Di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dipakai sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi pasal 37 ayat (2) menyebutkan bahwa isi kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat a) Pendidikan Agama, b) Pendidikan Kewarganegaraan dan c) Bahasa.

⁵ Anonim Pendidikan Kewarganegaraan, <http://www.scribd.com/doc/56233082/Pendidikan-Kewarganegaraan> di akses tgl, 09-04-2012

⁶ Ibid. hal 4

⁷ Ibid hal 4

Pendidikan Kewarganegaraan yang dijadikan salah satu mata kuliah inti sebagaimana tersebut di atas, dimaksudkan untuk memberi pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa, bangsa dan negara serta dapat menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Prinsip pengetahuan seperti yang dikemukakan di atas telah tertuang dalam Falsafah *Binci-Binciki Kuli* sebagai sistem nilai dan norma yang dipedomani segenap masyarakat di Kabupaten Buton merupakan buah pikir leluhur yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dalam membangun hubungan interaksi antar warga masyarakat, inti kandungan nilai yang ada dalam falsafah tersebut salah satunya adalah *poangka-angkataka*, yang berarti saling menghargai dan saling mengangkat derajat kemuliaan antar warga masyarakat terwujud dalam sikap dan perilaku saling memahami fungsi dan kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing.

Selain itu dalam falsafah *poangka-angkataka* mengajarkan juga kepada mereka yang berkuasa di atas kita, kita harus hormati atau segani, mereka yang sederajat dengan kita, merupakan sasaran perhatian kita, kepada mereka yang menjadikan kita atasan, kita tunjukan simpati. Ada bermacam-macam alasan untuk dimuliakan dan dipuji, karena kebesaran jiwa, karena kesalehan, karena keahlian yang mungkin berharga bagi seluruh kerajaan, serta karena alasan-alasan lain. Pendek kata, orang yang dihormati adalah mereka yang telah menghasilkan suatu kebaikan untuk seluruh kerajaan.

Disamping itu setiap anggota masyarakat yang sudah memberikan darma baktinya kepada masyarakat dan bangsa, wajib diberikan penghargaan yang setimpal, yang dapat mengangkat derajat dan martabatnya dimata masyarakat. darma bakti itu berupa memenangkan suatu perang, menyerahkan dengan ikhlas harta bendanya bagi kepentingan umum, memiliki suatu ilmu atau keterampilan yang berguna bagi kepentingan umum dan lain-lain⁸.

Kepada mereka itu diberikan balas jasa, penghargaan atau kehormatan tertentu seperti diberikan sebidang tanah untuk dimiliki turun-temurun, atau diberikan suatu pangkat tertentu. Hal itu dimaksudkan agar setiap anggota masyarakat tidak menjadi pemalas

⁸ Pim School, Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton. Jakarta : Djambatan 2003. Hal 89

atau lemah, agar tetap kuat, tetap tekun dan mempunyai kesediaan berkorban dan berjihad untuk kepentingan umum.

Berdasarkan pemaparan dari falsafah poangka-angkataka di atas sangat berhubungan erat dengan landasan pendidikan kewarganegaraan yaitu pencapaian cita-cita nasional harus didukung oleh kemampuan manusia Indonesia yang profesional dan berkualitas moral kebangsaan yang mewujudkan dalam sikap dan perilaku cinta tanah air dan yakin akan perjuangan menuju cita-cita nasional. “*Dwi warna purwa, cendekia wasana*” demikian Ki Hajar Dewantara mencerminkan kehendak unruk membangun manusia Indonesia yang memiliki sikap perilaku moral kebangsaan yang cinta tanah air, sadar akan hak, kewajiban serta profesional⁹. Sikap ini dapat menjadi pengarah, penjamin upaya pembangunan, agar tetap berada dalam rel yang benar, yakni rel kebangsaan Indonesia. Sikap perilaku warga negara yang cinta tanah air dan sadar hak dan kewajiban, salah satunya diupayakan dalam pendidikan kewarganegaraan yang merupakan bagian integral upaya membangun SDM.

E. Kesimpulan

Sebagai sebuah simpulan dari tulisan ini bahwa dalam rangka membangun semangat kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan dalam segala aspek memerlukan penyadaran sikap hidup warga negara yang menghargai nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan sosial, cinta tanah air, memiliki kesadaran hukum, dan kemampuan bela negara. Nilai-nilai tersebut harus disemai, ditanam, dipupuk, dan disebarakan secara terencana, teratur, dan terarah pada seluruh lapisan masyarakat agar tumbuh warga negara yang cerdas menghadapi zamannya.

Untuk menghasilkan atau membentuk manusia yang mempunyai kreativitas sosial, dan kreativitas spiritual serta manusia yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, cinta tanah air dan bangsa, maka falsafah “*pobinci-binciki kuli*” khususnya *poangka-angkataka* dapat dijadikan acuan dalam kehidupan keseharian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, http://www.scribd.com/doc/56233082/Pendidikan_Kewarganegaraan.
Anonim (Pelaut Banjar). 1267 H. *Hikayat Sipanjonga*. Aksara Arab

⁹ Minto Rahayu. Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 2007. Hal. 2

- Melayu.
- Anonim, Abad 19. *Kanturuna Mohelana*. Aksara Wolio.
- Deden M. La Ode, Memaknai Falsafah Binci-Binciki Kuli Masyarakat Buton dalam Pendidikan dan Pembentukan Karakter Anak, www.dedenbinlaode.web.id.
- Haliadi, 2000. *Buton Islam dan Islam Buton: Islamisasi Kolonialisme dan Singkritisisme Agama 1873 – 1938*. Yogyakarta: Tesis S2
http://www.scribd.com/doc/56233082/Pendidikan_Kewarganegaraan
di akses tgl, 09-04-2012.
- La Ode Madu. 1980. *Sejarah Masuknya Islam Di Buton dan Perkembangannya*. Bau-Bau: Depdikbud.
- Minto Rahayu. Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 2007.
- Pim Schoorl. *Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton*. Jakarta : Djambatan 2003.
- Suhady, Idup. Dkk. 2003. *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.